

PEMETAAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 DAN 2010 MENGUNAKAN ANALISIS KLASSTER

Minawati Widiastuti, Edy Yusuf A. G.¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Poverty is the problems from year to year included in the list of national strategic research. Many efforts have been conducted to poverty alleviation. Poverty alleviation who has done by government tending to make poor people become increasingly depending on the aid by foreign parties and not right on the target. To support the success of the program poverty alleviation in the Province of Central Java required a research that can classify distric that had the characteristic of poverty that nearly equal to or homogeny. This research grouping distric in the Province of Central Java to 6 clusters based on a indicator poverty by using analysis cluster. The variable that is used to classify distric in Central Java are 15 variables which is an indicator of poverty. The result showed that the division of a cluster 6, the region of the poorest are in a cluster 4 and in each cluster can be known which variables are the most dominant influence poverty a distric in Central Java. Then when compared between 2002 and 2010 can be known that occur distinction members of each cluster because a distric changes during the period of 8 years.

Key words: Poverty, Indicators of Poverty, Cluster Analysis, Mapping

PENDAHULUAN

Isu nyata dalam pembangunan adalah manusia (Todaro, 2003). Hal ini menyangkut bagaimana pembangunan seharusnya mampu untuk memenuhi tujuan manusia yaitu meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan manusia. Salah satu permasalahan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diduga sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi manusia yang melibatkan hampir semua aspek-aspek yang dipunyai manusia dalam kehidupannya. Pengentasan kemiskinan dan minimisasi ketimpangan merupakan inti dari seluruh kebijakan pembangunan. Di Indonesia masalah kemiskinan dari tahun ke tahun terus masuk ke dalam daftar penelitian strategis nasional.

Wacana kemiskinan dan pengentasannya menjadi agenda wajib bagi pemerintah. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam menggulangi masalah kemiskinan. Program-program tersebut antara lain adalah Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Raskin, Jaringan Pengaman Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri, dan lain-lain. Seiring perkembangan program yang dilakukan tetapi masalah kemiskinan belum dapat diselesaikan. Salah satu sebab kegagalan program dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya penyamaan atau penyeragaman kebijakan di tiap daerah tanpa memperhatikan terlebih dahulu permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di daerah tersebut padahal karakteristik serta isu-isu kemiskinan berbeda-beda pada setiap daerah.

Akibat dari program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran tersebut adalah perekonomian penduduk miskin sangat rentan dan dengan mudah kembali ke garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran agar dapat benar-benar membantu penduduk miskin meningkatkan derajat hidupnya. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan terutama yang berkaitan dengan

¹ Penulis penanggung jawab

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah diperlukan suatu penelitian yang dapat mengelompokkan kabupaten/kota yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik kemiskinan yang hampir sama atau homogen. Dengan mengetahui informasi mengenai ciri-ciri atau profil kemiskinan dari masing-masing kelompok kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut diharapkan program kebijakan pemerintah dapat disusun secara lebih terarah sesuai target atau sasaran yang ingin dicapai.

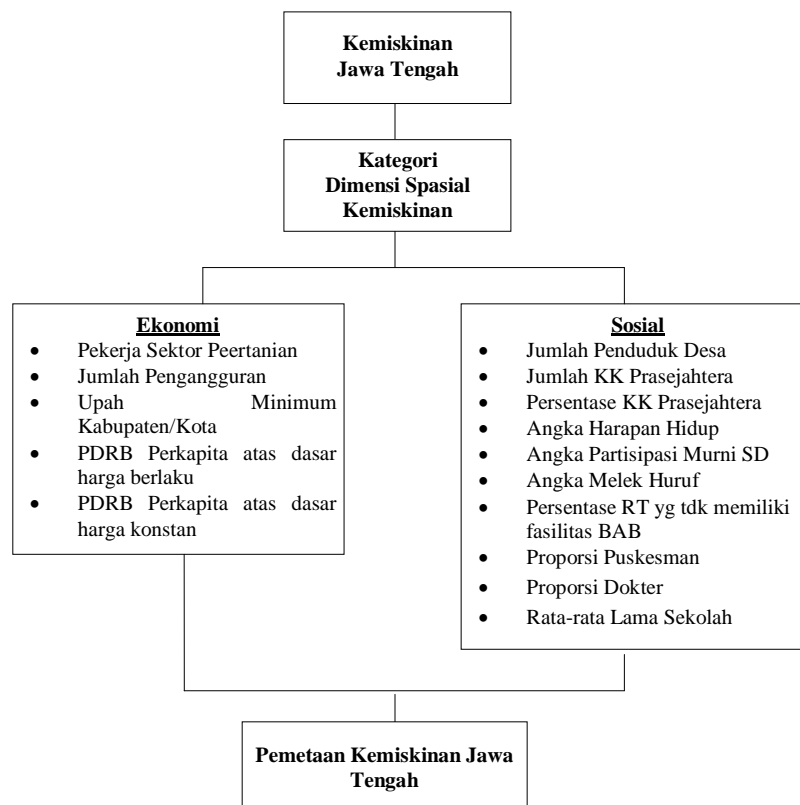
Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasar kesamaan variabel kemiskinan. Pengelompokan tersebut akan memudahkan dalam memberikan penanganan kemiskinan pada daerah-daerah yang seragam tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pemetaan daerah di kabupaten/ kota di Jawa Tengah pada penelitian ini didasarkan pada aspek dimensi spasial kemiskinan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2004) dimensi spasial kemiskinan dapat dilihat melalui kategori ekonomi dan sosial. Kategori ekonomi terdapat akses terhadap lapangan kerja sedangkan kategori sosial terdapat akses terhadap fasilitas pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta pada penelitian ini, ditambahkan kependudukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini melihat berdasarkan aspek dimensi spasial kemiskinan. Pada kategori ekonomi variabel yang digunakan antara lain pekerja sektor pertanian, jumlah pengangguran, upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Kategori sosial yang termasuk dalam bidang pendidikan, variabelnya antara lain angka partisipasi murni sekolah dasar, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah. Pada kategori sosial bidang kesehatan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain angka harapan hidup, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB, proporsi puskesmas, proporsi dokter, dan pada kategori sosial bidang kependudukan terdapat variabel jumlah penduduk desa, jumlah keluarga prasejahtera, persentase keluarga prasejahtera.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini merupakan diagram kerangka pemikiran yang skematis:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 15 variabel bebas. Variabel bebas atau *independent variable* meliputi pekerja sektor pertanian, jumlah penduduk desa, jumlah keluarga prasejahtera, persentase keluarga prasejahtera, angka harapan hidup, angka partisipasi murni sekolah dasar, jumlah pengangguran, jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB, proporsi dokter, proporsi puskesmas, upah minimum kabupaten, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, dan rata-rata lama sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada tahun 2002 serta tahun 2010. Data yang digunakan dikumpulkan dari data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi/dinas dan tidak langsung diambil dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diambil dari buku-buku terbitan BPS, meliputi Jawa Tengah dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Indikator Kemiskinan Jawa Tengah, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah, Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah serta literatur terkait. Pada tabel di bawah ini merupakan variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.1
Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
1	Pekerja Sektor Pertanian	Pekerja sektor pertanian dinyatakan dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam tiap kabupaten/kota.	Badan Pusat Statistik, Jateng dalam angka.
2	Jumlah Penduduk Desa	Penduduk desa merupakan jumlah total penduduk dalam tiap Kabupaten/Kota yang tinggal di pedesaan.	Badan Pusat Statistik, Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah
3	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Jumlah keluarga prasejahtera merupakan jumlah keluarga yang pendapatannya rendah dan berada di bawah garis kemiskinan (<i>Poverty Line</i>).	Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah dalam angka.
4	Persentase Keluarga Prasejahtera	Persentase keluarga prasejahtera merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.	Badan Pusat Statistik, Jateng dalam angka.
5	Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu.	Badan Pusat Statistik, Jateng dalam angka.
6	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Angka partisipasi murni mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu tingkat sekolah dasar untuk penduduk usia 7 – 12 tahun dalam Kabupaten/Kota.	Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah dalam angka.
7	Angka Melek Huruf	Merupakan penduduk berusia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam tiap Kabupaten/Kota.	Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan
8	Jumlah Pengangguran	Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkaan kerja yg sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.	Badan Pusat Statistik, Jateng dalam angka.
9	Persentase RT yg tdk Memiliki Fasilitas BAB	Persentase dari jumlah rumah tangga dalam Kabupaten/Kota yang tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar sendiri.	Badan Pusat Statistik, Susenas Jawa Tengah
10	Proporsi Puskesmas	Proporsi puskesmas adalah jumlah puskesmas yang ada di dalam Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah penduduk.	Badan Pusat Statistik, Susenas Jawa Tengah
11	Proporsi Dokter	Proporsi dokter adalah jumlah dokter yang ada di dalam tiap Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah penduduk.	Badan Pusat Statistik, Susenas Jawa Tengah
12	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Upah minimum adalah suatu standar minimum yang diterima Kabupaten/Kota	Badan Pusat Statistik, Jateng dalam angka.

No	Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
13	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.	Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
14	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	PDRB perkapita atas dasar harga konstan merupakan PDRB atas dasar harga konstan yang dibagi dengan jumlah penduduk, yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.	Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
15	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.	Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariat dengan pendekatan tehnik analisis klaster (pengelompokan). Dalam analisis klaster ini menggunakan Metode Ward karena dengan metode ini menunjukkan hasil pengelompokan kabupaten/kota dengan cara yang paling jelas dibandingkan dengan metode lainnya dan metode ini menemukan klaster yang paling *compact* jika melihat dari hasil dendogramnya.

Sebagaimana teknik multivariat lain proses analisis klaster dapat dijelaskan dalam enam tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama: tujuan analisis klaster

Tujuan utama analisis klaster adalah mempartisi suatu set objek menjadi dua kelompok atau lebih berdasarkan kesamaan karakteristik khusus yang dimilikinya. Penerapan analisis klaster secara tradisional bertujuan mengeksplorasi dan membentuk suatu klasifikasi/taksonomi secara empiris. Karena kemampuan partisinya analisis klaster dapat diterapkan secara luas. Meskipun secara empiris merupakan teknik eksplorasi analisis klaster dapat pula digunakan untuk tujuan konfirmasi. Pemilihan pada pengelompokan variabel, tujuan analisis klaster tidak dapat dipisahkan dengan pemilihan variabel yang digunakan untuk menggolongkan objek ke dalam klaster-klaster. Klaster yang terbentuk merefleksikan struktur yang melekat pada data seperti yang didefinisikan oleh variabel-variabel. Pemilihan variabel harus sesuai dengan teori dan konsep yang umum digunakan dan harus rasional. Rasionalitas ini didasarkan pada teori-teori eksplisit atau penelitian sebelumnya.

2. Desain penelitian dalam analisis klaster

Tiga hal penting dalam tahap ini adalah pendeteksian outlier, mengukur kesamaan, dan standarisasi data.

i. Pendeteksian outlier

Outlier adalah suatu objek yang sangat berbeda dengan objek lainnya. Outlier dapat digambarkan sebagai observasi yang secara nyata kebiasaan, tidak mewakili populasi umum, dan adanya *undersampling* dapat pula memunculkan outlier. Outlier menyebabkan struktur yang tidak benar dan klaster yang terbentuk menjadi tidak representatif.

ii. Mengukur kesamaan antar objek

konsep kesamaan adalah yang fundamental dalam analisis klaster. Kesamaan antar objek merupakan ukuran korespondensi antar objek. Ada tiga metode yang dapat diterapkan, yaitu ukuran korelasi, ukuran jarak, dan ukuran asosiasi.

iii. Standarisasi Data

a. Standarisasi variabel

Bentuk paling umum dalam standarisasi variabel adalah konversi setiap variabel terhadap skor standar (dikenal dengan Z score) dengan melakukan substraksi nilai tengah dan membaginya dengan standar deviasi tiap variabel.

b. Standarisasi data

Berbeda dengan standarisasi variabel, standarisasi data dilakukan terhadap observasi/objek yang akan dikelompokkan.

3. Asumsi-asumsi dalam analisis kluster
Seperti hal teknik analisis lain, analisis kluster juga menetapkan adanya suatu asumsi, ada dua asumsi dalam analisis kluster, yaitu:
 - i. Kecukupan sampel untuk merepresentasikan/mewakili populasi
Biasanya suatu penelitian dilakukan terhadap populasi diwakili oleh sekelompok sampel. Sampel yang digunakan dalam analisis kluster harus dapat mewakili populasi yang ingin dijelaskan, karena analisis ini baik jika sampel representatif. Jumlah sampel yang diambil tergantung penelitinya, sehingga seorang peneliti harus yakin bahwa sampel yang diambil representatif terhadap populasi.
 - ii. Pengaruh multikolinearitas
Ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel sangat diperhatikan dalam analisis kluster karena hal itu berpengaruh, sehingga variabel-variabel yang bersifat multikolinearitas secara eksplisit dipertimbangkan dengan lebih seksama.
4. Proses mendapatkan kluster dan menilai kelayakan secara keseluruhan
Alogaritma kluster harus dapat memaksimalkan perbedaan relatif kluster terhadap variasi dalam kluster. Dua metode paling umum dalam alogaritma kluster adalah metode hirarki dan metode non hirarki. Penentuan metode mana yang akan dipakai tergantung peneliti dan konteks penelitian dengan tidak mengabaikan substansi, teori dan konsep yang berlaku. Keduanya memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Keuntungan metode hirarki adalah cepat dalam proses pengolahan sehingga menghemat waktu, namun kelemahannya metode ini dapat menimbulkan kesalahan. Selain itu tidak baik diterapkan untuk menganalisis sampel dengan ukuran besar. Metode non hirarki memiliki keuntungan lebih dibanding dengan metode hirarki. Hasilnya memiliki sedikit kelemahan pada data outlier, ukuran jarak yang digunakan, dan termasuk variabel tak relevan atau variabel yang tidak tepat. Keuntungannya hanya dengan menggunakan titik bakal non random, penggunaan metode non hirarki untuk titik bakal non random secara nyata lebih buruk dari pada metode hirarki. Alternatif lain adalah dengan mengkombinasikan kedua metode ini. Pertama menggunakan metode hirarki kemudian dilanjutkan dengan metode non hirarki
5. Interpretasi terhadap kluster
Tahap interpretasi meliputi pengujian tiap kluster dalam terminologi untuk menamai dan menandai dengan suatu label yang secara akurat dapat menjelaskan kealamian kluster.
6. proses validasi dan pembuatan profil (*profiling*) kluster
 - i. Proses validasi solusi kluster
Proses validasi bertujuan menjamin bahwa solusi yang dihasilkan dari analisis kluster dapat mewakili populasi dan dapat digeneralisasi untuk objek lain. Pendekatan ini membandingkan solusi kluster dan menilai korespondensi hasil. Terkadang tidak dapat dipraktikkan karena adanya kendala waktu dan biaya atau ketidakterdediaan objek untuk analisis kluster ganda.
 - ii. Pembuatan profil (*profiling*) solusi kluster
Tahap ini menggambarkan karakteristik tiap kluster untuk menjelaskan kluster-kluster tersebut dapat berbeda pada dimensi yang relevan. Titik beratnya pada karakteristik yang secara signifikan berbeda antar kluster dan memprediksi anggota dalam suatu kluster khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat nilai rata-rata, minimum, serta maksimum dari variabel dalam penelitian ini. Pada tabel 3.2 di bawah ini merupakan statistik deskriptif dari 15 variabel untuk tahun 2002.

Pada tabel 1.2 di bawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 variabel jumlah pekerja sektor pertanian nilai minimumnya sebesar 840 jiwa dimiliki oleh Kota Magelang dan Kab. Brebes memiliki jumlah pekerja sektor pertanian terbanyak sebesar 428.888 jiwa serta memiliki jumlah penduduk desa terbanyak diantara 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang jumlah dan presentase keluarga prasejahteranya paling tinggi yaitu 272.937 jiwa (75,71 persen) dan PDRB perkapita atas dasar berlaku yang terendah yaitu 1.612.141,41 sedangkan Kota Surakarta merupakan kota dengan jumlah dan persentase keluarga prasejahtera terendah yaitu 1.714 jiwa (5,79 persen) dan persentase rumah tangga yang tidak

memiliki fasilitas BAB yang terendah pula yaitu 0,99 persen. Kabupaten Pati memiliki angka harapan hidup yang tertinggi yaitu 71,60 persen, sebaliknya Kab. Brebes memiliki angka harapan hidup yang rendah yaitu 63,30 persen dengan persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB yang tinggi yaitu sebesar 58,20 persen. Jumlah pengangguran tertinggi berada di Kota Semarang yaitu sebanyak 82.503 jiwa, serta terendah berada di Kota Magelang sebanyak 5.539 jiwa. Kabupaten Cilacap memiliki upah minimum kabupaten yang tertinggi yaitu sebesar Rp 350. 100,- dan PDRB perkapita atas dasar berlaku tertinggi yaitu sebesar 15.575.993,03. Upah minimum kabupaten yang terendah berada di Kabupaten Wonogiri yaitu Rp 314.500,-. Kabupaten Sragen memiliki angka melek huruf yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 71,60. Kota Salatiga memiliki rata-rata lama sekolah yang terlama yaitu 9,20 tahun dan yang terendah berada di Kabupaten Brebes.

Tabel 1.2
Statistik Deskriptif 15 Variabel Tahun 2002

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation	Variance Statistic
Jml pekerja sektor pertanian	840	428.888	176.582,26	110.353,348	1,218
Jml penduduk desa	0	1.157.617	533.494,06	321.739,111	1,035
Jml keluarga prasejahtera	1.714	272.937	93.189,43	57.804,889	3,341
Persentase keluarga prasejahtera	5,79	75,71	36,3677	17,0814	291,773
Angka harapan hidup	63,30	71,60	68,3343	1,9725	3,891
Angka partisipasi murni SD	93,21	100,00	97,9780	1,5864	2,517
Angka melek huruf	71,60	95,70	85,3571	5,3467	28,587
Jml pengangguran	5.539	82.503	28.120,97	18.644,4980	3,476
Persentase RT yg tidak memiliki fasilitas BAB	0,99	58,20	28,6557	17,2570	297,804
Proporsi puskesmas	0,005	0,018	0,0093	0,0028	0,000
Proporsi dokter	0,002	0,017	0,0052	0,0031	0,000
Upah minimum kabupaten/kota	314.500	350.100	326.581,43	8.638,9170	7,463
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	1.612.141,41	15.575.993,03	4,4193	3,4320	1,178
PDRB perkapita atas dasar harga konstan	570.525,17	10.062.163,85	1,7138	1,7964	3,227
Rata-rata lama sekolah	4,80	9,20	6,2229	1,1642	1,355

Sumber: output SPSS versi 16.0

Sedangkan pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah pekerja sektor pertanian terbanyak berada di Kab. Brebes yakni sebesar 416.322 jiwa dan yang terendah berada di Kota Magelang sebanyak 493 jiwa. Kabupaten Grobogan memiliki jumlah penduduk desa yang terbanyak yaitu 1.094.167 jiwa serta jumlah dan persentase keluarga prasejahtera yang tertinggi pula yaitu sebesar 272.201 jiwa (64,64 persen). Kabupaten Pati memiliki angka harapan hidup tertinggi yaitu 72,77 dan yang terendah berada di Kabupaten Brebes sebesar 67,37. Kabupaten Cilacap memiliki jumlah pengangguran tertinggi yaitu sebesar 74.298 jiwa dan yang terendah berada di Kota Magelang sebanyak 8.226 jiwa. Upah minimum kabupaten tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang yaitu sebesar Rp 939.756,- dan yang terendah sebesar Rp 662.000,- ada di Kabupaten Banjarnegara. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kudus yaitu sebesar 39.173.050,68 dan yang terendah berada di Kabupaten Purworejo sebesar 858.175,03. Rata-rata lama sekolah yang terlama yaitu sebesar 10,32 tahun berada di Kota Surakarta dan yang paling cepat 5,62 tahun berada di Kabupaten Brebes.

Tabel 3.3 di bawah merupakan statistik deskriptif 15 variabel untuk tahun 2010.

Tabel 1.3
Statistik Deskriptif 15 Variabel Tahun 2010

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation	Variance Statistic
Jml pekerja sektor pertanian	493	416.322	160.472,26	105.141,260	1,105
Jml penduduk desa	0	1.094.167	502.217,69	306.949,538	9,422
Jml keluarga prasejahtera	4.445	272.201	83.096,86	53.572,117	2,87
Persentase keluarga prasejahtera	9,76	64,64	28,3471	12,1283	147,095
Angka harapan hidup	67,37	72,77	70,3011	1,4475	2,095
Angka partisipasi murni SD	97,18	100,00	99,0654	0,6240	0,398
Angka melek huruf	82,14	97,25	90,4014	4,1399	17,139
Jml pengangguran	8.226	74.298	29.910,09	18.689,9830	3,493
Persentase RT yg tidak memiliki fasilitas BAB	0,33	43,13	18,2271	12,3029	151,362
Proporsi puskesmas	0,004	0,019	0,0093	0,0032	0,000
Proporsi dokter	0,004	0,027	0,0095	0,0052	0,000
Upah minimum kabupaten/kota	662.000	939.756	736.947,83	54.689,2830	2,991
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	858.175,03	39.173.050,68	1,0294	7,3237	5,364
PDRB perkapita atas dasar harga konstan	2.392.843,76	15.749.880,65	4,9124	3,0755	9,459
Rata-rata lama sekolah	5,62	10,32	7,3934	1,1765	1,384

Sumber: output SPSS versi 16.0

Pembagian 6 Klaster Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2002

Pengelompokkan kabupaten/ kota menjadi 6 klaster pada Tahun 2002 memiliki komposisi yang berbeda diantara masing-masing klasternya. Paling sedikit adalah klaster 3 dengan hanya terdiri dari satu kabupaten dan terbanyak adalah klaster 2 yang terdiri dari 19 kabupaten/ kota. Hasil analisis klaster Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dengan pembagian 6 klaster dan dapat dilihat dalam tabel 4.7 dan gambar 4.6

Tabel 1.4
Pembagian 6 Klaster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002

Klaster	Kabupaten/Kota
Klaster 1	Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kota Semarang
Klaster 2	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan
Klaster 3	Kab. Boyolali
Klaster 4	Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Pati
Klaster 5	Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes
Klaster 6	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal

Sumber: output SPSS versi 16.0 yang diolah

Berdasarkan rata-rata persentase keluarga miskin (keluarga pra sejahtera), urutan klaster dari yang termiskin yaitu klaster 4 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 55.07 persen, klaster 3 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 54.25 persen, klaster 2 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 39.47 persen, klaster 5 dengan rata-rata persentase

keluarga miskin sebesar 35.33 persen, klaster 1 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 22.14 persen, dan klaster 6 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 12.08 persen.

Dengan melihat variabel keluarga pra sejahtera, pada Tahun 2002 klaster 4 merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi dan klaster 6 merupakan wilayah dengan angka kemiskinan terendah. Indikator kemiskinan yang menunjukkan bahwa klaster 4 merupakan daerah termiskin antara lain rata-rata persentase keluarga yang sangat tinggi yaitu sebesar 55.07 persen, rendahnya rata-rata angka melek huruf yang hanya sebesar 77.54 persen, dan rendahnya rata-rata nilai PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan yaitu hanya sebesar Rp 14.369.712.000,- dan Rp 4.418.520,-. Adapun wilayah dengan angka kemiskinan terendah, klaster 6 memiliki karakteristik yang berlawanan dengan klaster 4. Pada klaster 6 terlihat bahwa wilayah ini merupakan wilayah dengan rata-rata persentase keluarga pra sejahtera terendah yaitu hanya sebesar 12.03 persen, rata-rata angka melek huruf tertinggi yaitu sebesar 91.66 persen, rata-rata jumlah pengangguran terendah yaitu sebesar 3.164 orang, rata-rata proporsi dokter tertinggi yaitu sebesar 0.01 dan rata-rata lama sekolah yang tertinggi yaitu sebesar 8.14 tahun.

Daerah yang tergolong kedalam klaster satu adalah wilayah dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi. Pada klaster ini rata-rata nilai indikator-indikator lainnya (selain PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku) memiliki nilai yang berada ditengah-tengah (mayoritas urutan ke-2). Wilayah ini terdiri atas Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang. Kebijakan yang sesuai untuk wilayah klaster satu adalah kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan melihat jumlah pengangguran di klaster satu lebih besar dibandingkan dengan klaster lainnya. Penambahan tenaga medis serta puskesmas juga diperlukan melihat proporsi dokter dan proporsi puskesmas yang rendah.

Wilayah klaster dua dan klaster tiga merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata dari tiap indikator kemiskinan yang nilainya berada ditengah-tengah diantara ke-enam klaster yang ada. Pada klaster tiga, nilai PDRB per Kapita atas dasar konstan lebih tinggi dibanding klaster lainnya. Klaster dua memerlukan kebijakan yang berhubungan dengan sanitasi permukiman atau penyuluhan akan pentingnya kebersihan karena tingginya angka jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB dibandingkan dengan klaster lainnya. Klaster tiga membutuhkan kebijakan untuk mendukung bebas buta aksara mengingat angka melek huruf pada klaster ini rendah.

Wilayah klaster empat merupakan wilayah dengan rata-rata jumlah penduduk desa, jumlah keluarga pra sejahtera dan prosentase keluarga pra sejahtera yang lebih tinggi dibanding klaster lainnya. Hal lain yang menarik adalah pada wilayah ini memiliki rata-rata angka harapan hidup yang juga lebih lama dibanding klaster yang lain. Wilayah yang berada di klaster empat membutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan hari tua. Hal ini perlu untuk menjamin kesejahteraan penduduk usia lanjut mempertimbangkan angka harapan hidup yang tinggi pada klaster ini. Kebijakan lain yang mungkin sesuai untuk diterapkan pada wilayah klaster empat adalah *transfer income* karena jumlah keluarga prasejahtera yang tinggi serta PDRB perkapita yang rendah. Kebijakan memberantas buta aksara juga sangat diperlukan melihat angka melek huruf pada klaster ini paling rendah dibandingkan dengan klaster lainnya.

Wilayah klaster lima merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sektor pertanian yang lebih tinggi dibanding klaster lainnya dan Angka Harapan Hidup yang paling rendah diantara ke-enam lainnya. Kebijakan yang dapat diterapkan pada klaster ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya yang terkait dengan rata-rata lama sekolah sesuai dan angka partisipasi SD. Kebijakan lain yang juga penting untuk diterapkan adalah kebijakan terkait sanitasi pemukiman dan pentingnya kebersihan melihat jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB pada klaster ini lebih tinggi dibanding klaster yang lain.

Daerah yang termasuk di dalam klaster enam memiliki nilai rata-rata variabel yang lebih rendah dibandingkan dengan klaster yang lain kecuali untuk variabel rata-rata lama sekolah. Dilihat dari anggota klaster enam diketahui kabupaten/ kota yang termasuk dalam klaster ini merupakan wilayah kota. Melihat corak perkotaan pada klaster ini, kebijakan yang sesuai untuk klaster enam adalah kebijakan terkait dengan kemiskinan kota, seperti penanganan daerah kumuh dan sebagainya.

Gambar 1.2
Pemetaan 6 Klaster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002



Pembagian 6 Klaster Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2010

Pergeseran komposisi anggota klaster dari Tahun 2002 terjadi pada Tahun 2010. Hasil analisis klaster Jawa Tengah untuk tahun 2010 dengan pembagian 6 dapat dilihat pada tabel 4.8 dan gambar 4.7 di bawah ini.

Tabel 1.5
Pembagian 6 Klaster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Klaster	Kabupaten/Kota
Klaster 1	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes
Klaster 2	Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan
Klaster 3	Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Semarang
Klaster 4	Kab. Grobogan, Kab. Pati
Klaster 5	Kab. Kudus, Kota Semarang
Klaster 6	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal

Sumber: output SPSS versi 16.0 yang diolah

Berdasarkan rata-rata persentase keluarga miskin (keluarga pra sejahtera), urutan klaster dari yang termiskin yaitu klaster 4 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 51.87 persen, klaster 3 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 32.36 persen, klaster 2 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 29.84 persen, klaster 1 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 28.07 persen, klaster 6 dengan rata-rata persentase keluarga 14.79 dan klaster 5 dengan rata-rata persentase keluarga 12.05.

Dengan melihat persentase keluarga pra sejahtera, pada tahun 2010 terjadi pergeseran wilayah dengan angka kemiskinan terendah yaitu dari klaster 6 menjadi klaster 5. Karakteristik klaster 5 yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan wilayah dengan angka kemiskinan terendah antara lain rata-rata upah minimum kabupaten, rata-rata PDRB menurut harga berlaku dan rata-rata PDRB menurut harga konstan yang tertinggi. Rata-rata upah minimum kabupaten di klaster 5 adalah sebesar Rp 857.378,- sedangkan rata-rata PDRB menurut harga berlaku dan rata-rata PDRB menurut harga konstan adalah sebesar Rp 33.636.505.000,- dan Rp 14.792.033,-. Adapun wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi tetap klaster 4 dengan karakteristik memiliki rata-rata pekerja sektor pertanian dan jumlah penduduk desa tertinggi yaitu sebesar 3222.262 orang

dan 941.956 orang, serta memiliki rata-rata PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun konstan terendah yaitu hanya sebesar Rp 6.363.132.000,- dan Rp 3.135.194.000,-.

Klaster satu adalah wilayah dengan jumlah pengangguran lebih banyak dibanding klaster yang lain. Pada klaster ini didapati juga upah minimum kabupaten dan rata-rata lama sekolah yang paling rendah diantara ke-6 klaster yang ada. Kebijakan yang sesuai untuk klaster satu antara lain kebijakan di bidang pendidikan (angka partisipasi SD dan rata-rata lama sekolah rendah), penambahan lapangan pekerjaan (jumlah pengangguran tinggi), serta kebijakan terkait dengan sanitasi perumahan (jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB tinggi).

Wilayah klaster dua dan klaster tiga merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata dari tiap indikator kemiskinan yang nilainya berada ditengah-tengah diantara ke-6 klaster yang ada. Pada tahun 2010 pada klaster tiga angka harapan hidup tetap didapati lebih tinggi dibanding klaster lainnya. Klaster dua membutuhkan kebijakan yang berhubungan dengan sanitasi (jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB paling tinggi) dan pendidikan (rata-rata lama sekolah rendah). Klaster tiga perlu memikirkan kebijakan terkait dengan jaminan sosial hari tua untuk menjamin kesejahteraan penduduk usia lanjut.

Wilayah klaster empat merupakan wilayah dengan rata-rata jumlah pekerja sektor pertanian, jumlah penduduk desa, jumlah dan proporsi keluarga pra sejahtera yang lebih tinggi serta angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendapatan atas dasar harga berlaku yang lebih rendah dibanding klaster lainnya. Kebijakan yang sesuai dengan klaster empat adalah *transfer income* karena PDRB perkapita yang paling rendah serta kebijakan jaminan sosial untuk penduduk usia lanjut (angka harapan hidup yang juga tinggi).

Wilayah klaster lima merupakan wilayah dengan persentase keluarga prasejahtera dan proporsi puskesmas dibanding jumlah penduduk rata-rata lebih rendah dibanding klaster lainnya. Pada klaster ini secara rata-rata upah minimum kabupaten, PDRB per Kapita baik berdasar harga berlaku maupun harga konstan berada diatas klaster yang lain. Kebijakan yang sesuai untuk klaster lima adalah penambahan lapangan pekerjaan karena jumlah pengangguran yang sangat tinggi dibandingkan klaster lainnya.

Daerah yang termasuk di dalam klaster enam memiliki nilai rata-rata variabel pekerja sektor pertanian, jumlah penduduk desa serta jumlah keluarga pra sejahtera secara rata-rata lebih rendah diantara ke-6 klaster yang ada. Pada klaster enam angka melek huruf secara rata-rata lebih tinggi dibanding klaster lainnya. Melihat corak perkotaan pada klaster ini, kebijakan yang sesuai untuk klaster enam adalah kebijakan terkait dengan kemiskinan kota, seperti penanganan daerah kumuh dan sebagainya.

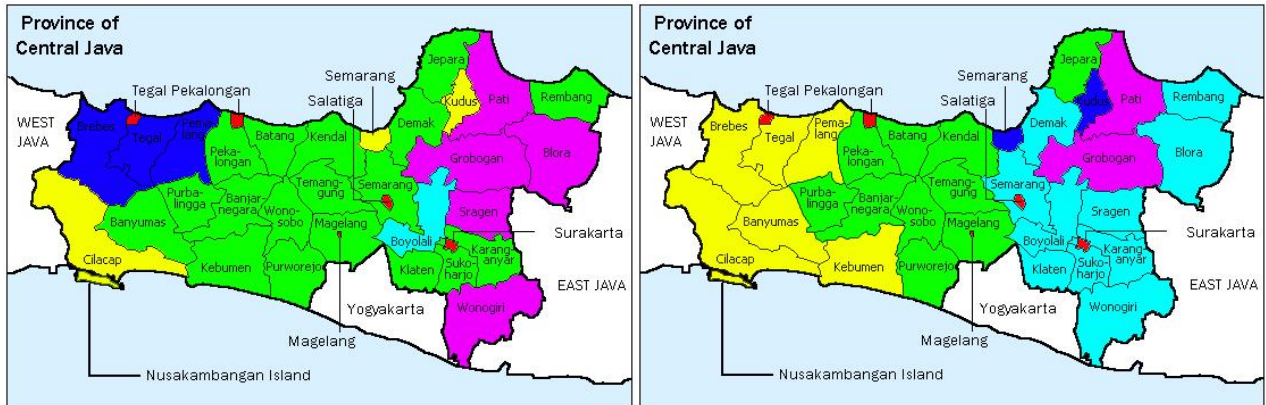
Gambar 1.3
Pemetaan 6 Klaster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010



Perbandingan Klaster Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2002 dan 2010

Gambar 1.4 dibawah merupakan peta tematik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil analisis klaster dengan menggunakan metode Ward yang dibagi menjadi 6 klaster tahun 2002 dan tahun 2010.

Gambar 1.4
Peta Pembagian 6 Klaster Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dan 2010



Hasil analisis klaster pada tahun 2002 dan 2010 dapat kita bandingkan dengan melihat kedua peta hasil analisis yang menggunakan 6 klaster. Pada tahun 2002, klaster 1 (berwarna kuning) yang terdiri dari Kab. Cilacap, Kab. Kudus dan Kota Semarang mengalami perubahan di tahun 2010 yang terdiri dari Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes. Kabupaten Cilacap pada tahun 2002 memiliki PDRB perkapita atas harga berlaku yang tinggi namun pada tahun 2010 PDRB perkapita atas harga berlaku tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kudus karena karakteristik yang dimiliki kabupaten tersebut berubah dalam kurun waktu 8 tahun sehingga anggota klaster 1 mengalami perubahan.

Pada klaster 2 (berwarna hijau) tahun 2002 mengalami perubahan di tahun 2010. Kabupaten yang mengalami perubahan antara lain Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Semarang. Sehingga jumlah kabupaten di dalam klaster 2 tahun 2002 berkurang jumlahnya di tahun 2010. Klaster 3 (berwarna biru muda) untuk tahun 2002 hanya Kab. Boyolali saja namun pada tahun 2010 mengalami perubahan dengan bertambahnya Kabupaten menjadi Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Semarang. Sedangkan klaster 4 (berwarna merah muda) yang pada tahun 2002 terdiri dari lima kabupaten yaitu Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri namun pada tahun 2010 hanya menjadi Kab. Pati dan Kab. Grobogan. Klaster 5 (berwarna biru) tahun 2002 dan 2010 memiliki karakteristik yang tidak berkesinambungan karena untuk klaster 5 tahun 2002 yang terdiri dari Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang sedangkan pada tahun 2010 yaitu terdiri dari Kota Semarang dan Kab. Kudus yang identik dengan pendapatan daerah tinggi berbeda dengan daerah lainnya. Klaster 6 (warna merah) tahun 2002 dan 2010 tidak mengalami perubahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan sesuai dengan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2002 dan dengan melihat variabel persentase keluarga pra sejahtera, wilayah termiskin adalah klaster 4 dan paling tidak miskin adalah klaster 6. Adapun karakteristik pembagian 6 klaster tahun 2002 berdasarkan indikator kemiskinan di Jawa Tengah yaitu:
 - a. Daerah yang tergolong kedalam klaster satu adalah wilayah dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi.
 - b. Wilayah klaster dua dan klaster tiga merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata dari tiap indikator kemiskinan yang nilainya berada ditengah-tengah diantara ke-enam klaster yang ada.

- c. Wilayah klaster lima ini memiliki rata-rata angka harapan hidup yang juga lebih lama dibanding klaster yang lain
 - d. Wilayah klaster lima merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sektor pertanian yang lebih tinggi dibanding klaster lainnya dan Angka Harapan Hidup yang paling rendah diantara ke-enam lainnya.
 - e. Dilihat dari anggota klaster enam diketahui kabupaten/ kota yang termasuk dalam klaster ini merupakan wilayah kota.
2. Wilayah termiskin pada tahun 2010 berdasarkan variabel persentase keluarga pra sejahtera tidak berubah yaitu klaster 4, sedangkan wilayah yang paling tidak miskin bergeser dari klaster 6 menjadi klaster 5. Adapun karakteristik pembagian 6 klaster tahun 2010 berdasarkan indikator kemiskinan di Jawa Tengah yaitu:
- a. Klaster satu adalah wilayah dengan jumlah pengangguran lebih banyak dibanding klaster yang lain.
 - b. Wilayah klaster dua dan klaster tiga merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata dari tiap indikator kemiskinan yang nilainya berada ditengah-tengah diantara ke- enam klaster yang ada.
 - c. Wilayah klaster empat merupakan wilayah dengan rata-rata jumlah pekerja sektor pertanian, jumlah penduduk desa, jumlah dan proporsi keluarga pra sejahtera yang lebih tinggi.
 - d. Wilayah klaster lima merupakan wilayah dengan PDRB per Kapita baik berdasar harga berlaku maupun harga konstan berada diatas klaster yang lain.
 - e. Klaster enam memiliki nilai rata-rata variabel pekerja sektor pertanian, jumlah penduduk desa serta jumlah keluarga pra sejahtera secara rata-rata lebih rendah diantara ke-6 klaster yang ada.
3. Berdasarkan indikator kemiskinan, terjadi perubahan komposisi kabupaten/ kota pada masing-masing klaster. Klaster 4 yang merupakan wilayah termiskin, pada tahun 2002 terdiri dari Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Pati sedangkan pada tahun 2010 hanya terdiri dari Kab. Grobogan, Kab. Pati. Pergeseran wilayah paling tidak miskin juga terjadi yaitu dari klaster 6 menjadi klaster 5.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan data tahun 2002 dan 2010 yang jarak antara kedua tahun tersebut tidak begitu lama jika dilihat dari dampak program pemerintah yang diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah. Selain itu, salah satu variabel yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) hanya ada selama 3 – 4 tahun sekali sehingga jika menggunakan variabel ini penelitian tidak dapat dilakukan setiap tahun.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang dihasilkan maka upaya yang dapat disarankan antara lain:

1. Dengan adanya pemetaan kemiskinan ini pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Beberapa saran kebijakan terkait dengan hasil *klustering* (sesuai tahun terbaru) yang dapat dilakukan diantaranya :
 - Dengan pembagian 6 klaster pada tahun 2002 :
 - Kebijakan yang sesuai untuk wilayah klaster satu adalah kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, penambahan tenaga medis serta puskesmas.
 - Klaster dua memerlukan kebijakan yang berhubungan dengan sanitasi permukiman atau penyuluhan akan pentingnya kebersihan.
 - Klaster tiga membutuhkan kebijakan untuk mendukung bebas buta aksara mengingat angka melek huruf pada klaster ini rendah.
 - Wilayah yang berada di klaster empat membutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan hari tua, *transfer income*, kebijakan memberantas buta aksara juga sangat diperlukan melihat angka melek huruf pada klaster ini paling rendah dibandingkan dengan klaster lainnya.

- Kebijakan yang dapat diterapkan pada klaster ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, kebijakan terkait sanitasi pemukiman dan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan.
- Kebijakan yang sesuai untuk klaster enam adalah kebijakan terkait dengan kemiskinan kota, seperti penanganan daerah kumuh dan sebagainya.
- Dengan pembagian 6 klaster pada tahun 2010 :
 - Kebijakan yang sesuai untuk klaster satu antara lain kebijakan di bidang pendidikan (angka partisipasi SD dan rata-rata lama sekolah rendah), penambahan lapangan pekerjaan (jumlah pengangguran tinggi), serta kebijakan terkait dengan sanitasi perumahan (jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB tinggi)
 - Klaster dua membutuhkan kebijakan yang berhubungan dengan sanitasi (jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB paling tinggi) dan pendidikan (rata-rata lama sekolah rendah).
 - Klaster tiga perlu memikirkan kebijakan terkait dengan jaminan sosial hari tua untuk menjamin kesejahteraan penduduk usia lanjut.
 - Kebijakan yang sesuai dengan klaster empat adalah *transfer income* karena PDRB perkapita yang paling rendah serta kebijakan jaminan sosial untuk penduduk usia lanjut (angka harapan hidup yang juga tinggi).
 - Kebijakan yang sesuai untuk klaster lima adalah penambahan lapangan pekerjaan karena jumlah pengangguran yang sangat tinggi dibandingkan klaster lainnya.
 - Kebijakan yang sesuai untuk klaster enam adalah kebijakan terkait dengan kemiskinan kota, seperti penanganan daerah kumuh dan sebagainya.
- 2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan variabel-variabel lainnya yang masih termasuk dalam indikator kemiskinan dengan populasi yang lebih luas.
- 3. Dengan penelitian yang serupa dapat pula untuk mengetahui dampak suatu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah dari dimulainya kebijakan tersebut sampai tahun yang terbaru.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2003. Jawa Tengah Dalam Angka 2003. Semarang
- 2009. Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2002 – 2009. Semarang
- 2010. Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2010. Semarang
- 2011. *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistik Penduduk Miskin. Propinsi Jawa Tengah. Semarang
- 2011. Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah 2011. Semarang.
- Barke, Michael & O'Hare, Greg.1991. *The third world Conceptual Frameworks in geography*. Oliver & Boyd. Edinburgh.
- Cahyat, Ade. 2004. *Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. Center for International Forestry Research: Governance Brief, No. 2, November.
- Cristina del campo, et.al. 2005. *The Socioeconomic Diversity of European Regions*. Spanyol.
- Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. http://www.jmpk-online.net/Volume8/Vol_08_No_03_2005.pdf. Diakses tanggal 11 November 2009.
- Dowling, Malcolm dan Ma Rebecca Valenzuela. 2004. *Economic Development In Asia*. Singapura: Thomson Asia Pte Ltd
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ionescu, Alina Măriuca. 2006. *Poverty Mapping of Romanian Counties using Cluster Analysis*. Rumania.



- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, A.S. 2008. *Kemiskinan: Kesenjangan antar Provinsi*. Project Officer untuk TARGETMDGs (BAPENAS/UNDP). MDGs News, Edisi 01/Juli – September 2008.
- Limam, Imed. 1998. *A Socio-Economic Taxonomy of Arab Countries*. Saudi Arabia
- Mattjik, A., I.M. Sumertajaya, H. Wijayanto, Indahwati, A. Kurnia. dan B. Sartono. 2002. *Aplikasi Analisis Peubah Ganda*. Depdiknas. Bogor. Milligan, G. W. 1980.
- Mulyono, Sri. *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: LP-FEUI, 2006.
- Muslim, M. Rahardian. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981 – 2007*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Osmanković, Jasmina. 2009. *The Application of Factorial and Cluster Analysis in Regional Policy. Bosnia and Herzegovina*.
- Prasetyo, Adit A. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. FE Undip Semarang.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.